

**PROFESIONALISME MILITER TNI ANGKATAN DARAT
DI KOREM 032 WIRABRAJA SUMATERA BARAT**

TESIS



**Oleh
INOKI ULMA TIARA
NIM 1104180**

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
Mendapatkan gelar Magister Pendidikan**

**KONSENTRASI PENDIDIKAN ANTROPOLOGI SOSIOLOGI
PROGRAM STUDI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Mahasiswa : *INOKI ULMA TIARA*
NIM. : 1104180

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. Mestika Zed, M.A.
Pembimbing I

Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D.
Pembimbing II



4-2-2014

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Padang

Ketua Program Studi/Konsentrasi



4/2/2014

Prof. Dr. Agus Irianto
NIP. 19540830 198003 1 001
PLT. SK Nomor: 187/UN35/KP/2013
Tanggal 23 Juli 2013

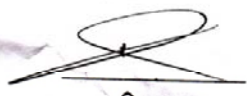
Prof. Dr. Gusril, M.Pd.
NIP. 19580816 198603 1 004
PLT.ST Nomor: 2513/UN.35/KP/2013
Tanggal 24 Desember 2013

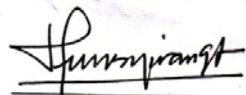
**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

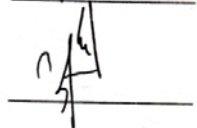
No.	Nama	Tanda Tangan
-----	------	--------------

1	<u>Prof. Dr. Mestika Zed, M.A.</u> (Ketua)	
---	---	---

2	<u>Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D.</u> (Sekretaris)	
---	---	---

3	<u>Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.</u> (Anggota)	
---	---	--

4	<u>Prof. Dr. Nursyirwan Effendi</u> (Anggota)	
---	--	---

5	<u>Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd.</u> (Anggota)	
---	---	---

Mahasiswa

Mahasiswa : *INOKI ULMA TIARA*

NIM. : 1104180

Tanggal Ujian : 23 - 1 - 2014

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul Profesionalisme Militer TNI Angkatan Darat di Korem 032 Wirabaja Sumatera Barat adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilain, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, ketika dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam tesis naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku

Padang, 5 Maret 2014

Saya yang menyatakan



Inoki Ulma Tiara

Nim:1104180

ABSTRACT

Inoki Ulma Tiara, 2011-1104180: Profesionalisme Militer TNI Angkatan Darat di Korem 032 Wirabraja Sumatera Barat.

Together with national reformation, Indonesian national military has been realized with the need of doing professionalism. Professionalism inside of national army has become consciousness and commitment of Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), especially Indonesian army ground forces (TNI AD). TNI as organization which defense the country is hoped more advance and modern. In democracy country, the duty of TNI and the army has been described clearly, that is old professionalism which is only at defense aspect. This research is for understanding of TNI professionalism from the understanding of TNI itself, and to understand TNI professionalism in Korem 032 Wirabraja West Sumatera. The informant comes from the military officers from West Sumatera, Java, and Bima. This various background is useful to get variety of data. This research is qualitative research with the technique of data collection through interview, observation and document analysis. Based on the data analysis, it shows that the response to the military professionalism inside of TNI is very good. The effect of response of professionalism of military inside of TNI AD at Korem 032 Wirabraja West Sumatera has been accrued directly that make professional aspect clearly, it is the duty of TNI AD at Korem 032 Wirabraja only on defense aspect.

Kata Kunci: Profesionalisme Militer, TNI Angkatan Darat

ABTRAKS

Inoki Ulma Tiara, 2011-1104180: Profesionalisme Militer TNI Angkatan Darat di Korem 032 Wirabraja Sumatera Barat

Seiring dengan gerakan reformasi nasional, TNI (Tentara Nasional Indonesia) telah menyadari kebutuhan untuk melaksanakan profesionalisme. profesionalisme di internal TNI telah menjadi kesadaran dan komitmen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia khususnya TNI Angkatan Darat. TNI sebagai lembaga pertahanan negara diharapkan lebih maju dan modern. Dalam negara demokrasi peran dan tugas TNI dan prajurit TNI digambarkan dengan jelas yaitu *old proffessionalis* yaitu peran TNI hanya dalam aspek pertahanan.

Penelitian ini untuk memahami profesionalisme TNI dari pemahaman TNI itu sendiri, penelitian untuk memahami profesionalisme TNI dilakukan di Korem 032 Wirabraja Sumatera Barat. Informannya berasal dari perwira menengah dari Sumatera Barat, Jawa, dan Bima. Berbagai latar belakang ini dilakukan untuk mendapatkan variata data. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan analisis dokumen.

Berdasarkan analisa data menunjukan bahwa respon terhadap profesionalisme militer di internal TNI sangat baik. Pengaruh respon profesionalisme militer di internal TNI AD yaitu Korem 032 Wirabraja Sumatera Barat telah terjadi secara langsung dengan membentuk aspek profesional secara tegas. Aspek yang dibentuk secara tegas tersebut adalah tugas TNI AD di Korem 032 Wirabraja hanya pada aspek pertahanan.

Kata kunci: Profesionalisme militer dan TNI Angkatan Darat

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Shalawat beriring Salam saya ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak diharapkan syafaatnya di hari kemudian kelak.

Saya menyadari dalam hal penulisan baik teori pendukung, sistem penulisan, kata-kata dan isi dari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan wawasan, pengetahuan, waktu dan dana yang saya miliki, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya.

Kepada Bapak Prof. Dr. Mestika Zed dan Dra. Hj. Fitri Eriyanti M.Pd, Ph.D sebagai dosen pembimbing Tesis, saya ucapkan terimakasih, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan meminjamkan buku pada saya hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung selama ini kepada penulis yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram, selaku Rektor UNP.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agus Irianto selaku PLT Direktur program Pascasarjana UNP beserta staf dan karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam administrasi.
3. Bapak Prof. Dr. Gusril. M.Pd selaku Ketua Prodi Pendidikan IPS program Pascasarjana UNP.
4. Bapak Prof. Aswar Ananda, Bapak Prof Sufyarma Marsidin, dan Bapak Prof. Nusyirwan Effendi sebagai penguji.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Konsentrasi Pendidikan IPS program Pascasarjana UNP.
6. Kepada bapak Kolonel Inf. Drs Amrin sebagai komandan Korem 032 Wirabraja yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian dilembaga yang pimpin dan bersedia menjadi narasumber. Bagi

penulis juga sebuah kebanggaan karena bapak Kolonel Inf. Drs Amrin ini adalah putra daerah Sumatera Barat menjadi pimpinan dilembaga TNI khususnya angkatan darat.

7. Bapak Letkol Caj Drs Suherman M.Si, bapak Mayor Inf Dekki Sujatmiko S.Pd, bapak Mayor Chk Destrio Irvano S.H, dan bapak Mayor Inf Drs Isnaeni selaku informan sekaligus sahabat dalam penelitian ini.
8. Semua teman-teman mahasiswa program Pascasarjana UNP Pendidikan IPS angkatan 2011, kita berbeda umur dan latar belakang tetapi tidak dengan pemikiran.
9. Yang teristiwah untuk papa tercinta Ulil Amri M dan Ibu Rosmani Alam adalah topangan yang kokoh dan tempat kembali dari kekalahan. Adik-adikku Harry Ulma Tiara A.Md dan Lia Pramita Indah Tiara S. Pd Istri tercinta Krisna Amelia A.Md yang menyediakan kasih sayang dan cinta yang mulia, anak-anak kebanggaan ayah Khalisa Salvia Maorin, Calysta Damara Felisa, Muhhamad Rhinggamana, dan Azka Alvaro Mahasa. Keyakinan ayah suatu saat nanti kalian semua yang melebihi ayah, dalam segala hal baik dan berprestasi.
10. Untuk teman-teman DPW NasDem Sumatera Barat yang betah mendengarkan keluh kesah, bang Yusmeri, bang Marhadi, Om Erizal Effendy, Bang Hayatul Fikri, bang Diki Riswa, Nova Hendria. Kekurangan materi tidak boleh membuat kita tertunduk dan kehilangan kebebasan berbicara.
11. Keluarga besar Parlin Parkit 7 nomor 6 Defri, Viko Roles, Aldo, Robi, Asyari Parlungan, Popoik, Nori, Al Jeki, Sukri, Mas Roy, Rolan, Kris, Ari Mamak, Capaik, Asua, Taufik.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda. Saya menyadari penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya tesis

yang sempurna. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi penambah wawasan bagi yang membutuhkan.

Padang, Maret 2014

Penulis

Inoki Ulma Tiara

DAFTAR ISI

ABTRAKS	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah dan Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Militer dan Profesionalisme Militer	10
2. Profesionalisme Militer sebagai Institusi dan Perannya dalam Negara	12
3. Perwira dalam Organisasi Militer	16
a. Tanggug Jawab Perwira Profesional.....	16
b. Keahlian Perwira Profesional.....	17
c. Organisasi Perwira Profesional	18
4. Pemaknaan Profesionalisme Militer dengan Teori Interaksi Simbolik	19
a. Teori Interaksi Simbolik	19
b. Teori Kontruksi Sosial	23
B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	25
C. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
1. Observasi.....	31
2. Wawancara.....	31
3. Dokumenter.....	34

D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	34
1. Perpanjangan keikutsertaan.....	34
2. Ketekunan Pengamatan.....	35
3. Triangulasi	35
E. Teknik Pengolahan Data	37
1. Reduksi Data	37
2. Penyajian Data	38
3. Penarikan Kesimpulan	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
A. TEMUAN UMUM.....	40
1. Sejarah Pembentukan Korem 032 Wirabaja.....	40
2. Komandan Korem Dari Waktu ke Waktu.....	42
3. Personil Korem 032 Wirabaja.....	43
4. Struktur Perwira Menengah di Korem Wirabaja	44
5. Visi Dan Misi Korem 032/Wirabaja	46
6. Birokrasi Militer.....	46
7. Tata Kelola Lingkungan Korem 032 Wirabaja.....	53
8. Prajurit Tidak Suka Membaca.....	55
9. Tata Ruang Korem	56
10. Pangkat dan Lencana.....	57
11. Bahasa Militer	57
B. TEMUAN KHUSUS.....	60
1. Pemahaman Perwira Menengah tentang Profesionalisme Militer di KOREM 032 Wirabaja Sumatera Barat	60
a. Identitas Militer menurut Perwira Menengah	60
b. Profesionalisme Militer	66
c. Identitas Lembaga Militer	70
d. Identitas Perwira Militer	76
2. Tanggung Jawab Perwira dan keahlian perwira.....	79
3. Penafsiran Perwira Menengah Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Terhadap TNI.....	81

4. Hambatan dalam Profesionalisme Militer di Korem 032 Wirabraja.....	84
a. Gaji Prajurit.....	85
b. Peralatan dan Perlengkapan	87
5. Perwira Menengah Korem 032 Wirabraja Menjawab Reformasi Militer.....	90
6. Profesionalisme Militer dilihat Karir Terbaik Putra Daerah Sumatera Barat.....	93
a. Kompetensi Pribadi.....	94
b. Rekomendasi Sosial Kemasyarakatan.....	95
c. PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia).....	96
BAB V PEMBAHASAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN.....	99
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN.....	122

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan usia yang telah mencapai lebih dari setengah abad, TNI mengalami pasang surut dalam mempertahankan eksistensinya sebagai tentara profesional.

Dalam negara demokrasi profesionalisme militer diartikan peran militer (tentara) dibatasi pada pelaksanaan perintah dibidang pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri (keadaan darurat) dibawah supremasi sipil.¹ Adanya supremasi sipil mengharuskan militer mengabdikan diri secara profesional pada keputusan-keputusan politik sipil. Sebagai alat negara, militer harus dibawah kendali dan kontrol masyarakat sipil. Institusi militer hanyalah menjadi agen operasional atau pelaksana efektif di lapangan, yang diikuti pula oleh mekanisme pertanggungjawaban ke publik secara transparan. Cara kontrol demikian, tentu saja tetap mempertimbangkan pada prinsip penghargaan atas otoritas profesionalisme yang diberikan kepada kemandirian militer.

Secara historis ada tiga peristiwa penting yang menjadikan TNI merasa lebih berjasa dan tidak berada dibawah otoritas sipil. Pertama adalah revolusi kemerdekaan tahun 1945-1949. Pada revolusi fisik ini, perjuangan bersenjata

¹ Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik, Dulu, Kini, dan Kelak* (Jakarta:Surya Multi Grafika) hal v

yang dilakukan oleh TNI diklaim sebagai saham terbesar mereka ketika mendirikan negara Indonesia. Kedua adalah saat pemberontakan muncul di berbagai daerah pada dekade 50-an. Keberhasilan TNI untuk membungkam pemberontakan-pemberontakan tersebut melalui operasi militer diklaim sebagai saham penting TNI untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Ketiga, keberhasilan TNI menghancurkan Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah peristiwa G 30 S/PKI semakin memperbesar saham TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Dari ketiga peristiwa penting tersebut, keberadaan TNI yang berada di garis depan untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan mendapatkan legitimasi.

Faktor historis tersebut membuat Indonesia belum memiliki pengalaman otentik bagaimana sistem politik secara substansial menempatkan posisi tentara dalam kerangka subordinasi sipil, apalagi dalam bentuk kontrol efektif sebagaimana diberlakukan pada negara demokratis. Bahkan, yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Militerlah yang cenderung mendominasi *civil society*. Ini dapat dirunut dari pengalaman panjang dari masa revolusi kemedekaan dan semakin intens ketika Orde Baru berkuasa.

Kebijakan negara Indonesia untuk membentuk TNI menjadi militer profesional dibawah supremasi sipil sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Sutan Syahrir dan Amir Syarifudin, militer ditempatkan dalam posisi alat negara dibawah kendali pemerintah sesuai dengan supremasi sipil². Namun, militer berpandangan

² Reid J.S Anthony, *Revolusi Nasional Indonesia* (Jakarta: Penebar Swadaya, 1996) hal. 139

kebijakan tersebut tidak realistis mengingat proses lahir dan tumbuhnya TKR yang menganggap dirinya sebagai alat perjuangan rakyat dan bukannya sebagai alat negara belaka di bawah kendali pemerintah³.

Kegagalan kebijakan profesional militer dibawah supremasi sipil di Indonesia berhubungan erat dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan sistem politik, karena militer profesional muncul didalam sistem politik yang stabil. Dinamika politik nasional yang kacau menciptakan perspektif dikalangan militer untuk turut campur dalam politik praktis dan keraguan terhadap kepemimpinan kaum sipil maupun terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Di sisi lain gagalnya kebijakan profesional militer di bawah supremasi sipil militer di Indonesia adalah karena militer digunakan untuk mempertahankan kekuasaan oleh rezim yang berkuasa. Pada masa Sukarno, militer diakui sebagai kekuatan politik dalam lembaga negara (Dewan Nasional) yang dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah melibatkan TNI dalam politik dengan membiarkan berlangsungnya proses *balance of power* antara dua kekuatan politik utama pada waktu itu yakni TNI dan PKI. Meletusnya peristiwa “Gerakan 30 September” pada tanggal 1 Oktober 1965, merupakan suatu *turning point* dalam perkembangan politik nasional Indonesia memperkuat posisi dan kelanggengan dominasi politik tentara dalam sistem politik nasional.

Begitu pun dengan pemerintahan Orde Baru, militer ditempatkan pada kedudukan yang istimewa sebagai motor pembangunan dan atas penilaian ketidakmampuan sipil. Di bawah kendali Soeharto yang menempatkan militer

³ Soebijono, *DWIFUNGSI ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997) hal 13

pada tempat spesial baik atas dasar ikatan psikologis ataupun keyakinan atas militer sebagai salah satu keistimewaan yang diberikan kepada militer adalah menempatkannya pada posisi strategis pemerintahan dalam konsep dwifungsi ABRI, dimana angkatan bersenjata dilihat secara sah sebagai kekuatan militer dan sosial-politik dimana kekuatan sosial-politiknya dikukuhkan secara legal.

Berakhirnyapemerintahan Orde Baru mendorong reformasi di semua lini, termasuk mereformasi ABRI yang selama ini menjadi alat dan bagian dari kekuasaan. Berbagai tuntutan bermunculan agar TNI kembali ke barak.⁴ yang disebabkan praktik-praktik otoriterisme secara massif semasa Orde Baru dimana militer merupakan "mesin resmi" kekerasan negara. Tidak mengherankan jikalau momentum ledakan perlawanan masyarakat atas praktik kesewenang-wenangan mengawali gerakan reformasi politik beberapa tahun berikutnya, senantiasa menempatkan sasaran utama pada sikap dan perilaku militer.

Sejumlah bukti mengenai ekspresi kekerasan aparat bersenjata selama ini telah menjadi ingatan kolektif yang mengenaskan, yang dengan sendirinya menyebabkan keprihatinan dan kebencian masyarakat. Seperti yang dicatat Bhakti dalam Makhasyin (2002:6-7) beberapa kekerasan yang dilakukan TNI adalah terjadinya penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi dan terbunuhnya empat mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 dan belum ada pengusutan menjadikan masyarakat tidak percaya pada kemampuan TNI untuk menjaga stabilitas. Karenanya, semua itu kian menebalkan argumen atas adanya keyakinan bahwa, gerakan reformasi politik di Indonesia saat ini dianggap "berhasil"

⁴ Asren Nasution, 2003, *Religiositas TNI Refleksi Pemikiran Jenderal Besar Soedirman* (Jakarta: Prenada Media) hal 25

jikalauprasyarat penting dapat dipenuhi, yakni dilakukannya perombakan mendasar atas posisi dan peran militer di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dimulai rintisan kebijakan untuk “menghalau” militer dari arena politik praktis, karena alasan mendasar perlunya institusi militer untuk kembali pada fungsi utamanya dan memperbaiki kembali konsep hubungan sipil-militer dengan lebih mengedepankan pada supremasi sipil. Kebijakan tersebut diantaranya strategi untuk pemisahan antara militer dengan kepolisian, yang dilandasi oleh perbedaan substansial posisi dan perannya dalam kehidupan masyarakat. Carut-marutnya posisi keduanya menyebabkan hancurnya profesionalisme yang semestinya diemban oleh kedua institusi tersebut. Tentara, yang sesungguhnya hanya memiliki wilayah pertahanan negara ternyata merasuki area keamanan yang merupakan otoritas kepolisian. Sebaliknya pula, kepolisian yang semestinya merupakan kekuatan sipil malahan mengalami militerisasi. Upaya-upaya membatasi ruang militer sebelumnya juga diawalinya dengan proses sipilisasi institusi pertahanan, dimana secara simbolis diwujudkan dalam bentuk pengisian jabatan menteri pertahanan dari kalangan sipil.

Transisi demokrasi yang diupayakan di Indonesia memang masih mewarisi gurita militerisasi yang berakar kuat dalam rezim otoritarian (Orde Baru) sebelumnya. Oleh karena itu, dimasa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dikeluarkan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berarti prasyarat penting tegaknya supremasi sipil, absennya militer dari arena politik dan terbangunnya militer profesional.

Perubahan-perubahan kebijakan negara untuk membangun militer yang profesional membawa dampak terhadap militer secara keseluruhan, yakni meliputi komando kewilayahan diberbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Korem 032/Wirabraja yang berada dibawah Kodam I/ Bukit Barisan sebagai basis kekuasaan tentara (AD) TNI penyelenggaraan pertahanan untuk wilayah Sumatera Barat yang membawahi 10 Kodim dan 2 Bataliyon.⁵ Profesionalisme militer pada tatanan implementasinya di Korem 032 Wirabraja menunjukkan perubahan-perubahan signifikan sekitar organisasi TNI khususnya Angkatan Darat sebagai proses dialektika prajurit Angkatan Darat dalam memaknai profesionalisme.⁶

Dengan demikian penelitian tentang profesionalisme militer menarik untuk dilakukan karena: *pertama*, profesionalisme merupakan karakteristik militer yang paling utama. Terwujudnya TNI profesional, akan membawa dampak terhadap kemampuan TNI untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan bangsa dan negara serta kelangsungan pembangunan nasional. *Kedua*, perjalanan sejarah militer begitu kompleks sehingga masih banyak celah dan ruang yang belum diteliti, baik secara nasional maupun secara kedaerahan. *Ketiga*, profesionalisme militer merupakan isu-isu populer dalam wacana hubungan sipil-militer dalam demokrasi di Indonesia.

⁵ Korem 032/Wirabraja adalah hasil penggabungan 2 (dua) Korem sebelumnya yaitu Korem 032/Wirabraja yang berkedudukan di Bukittinggi dan Korem 033/Wirayudha yang berkedudukan di Solok. Keputusan Kasad No. Kep/30/I/1985 tanggal 22 Januari 1985 dan surat perintah Pangdam III/17 Agustus No. Sprin/91/I/1985 tanggal 23 Januari yang Makoremnya berkedudukan di Kota Madya Padang. Mulai saat itu resmiah berdirinya Korem 032/Wirabraja yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh kepada Pangdam III/17 Agustus yang kemudian dilikuidasi ke dalam Kodam I Bukit Barisan.

⁶ Kusnanto Anggoro, 2008, *Pengantar Profesionalisme Militer, Profesionalisasi TNI* (Malang: UMM Press) hal xv

B. Masalah dan Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan melihat bagaimana profesionalisme militer di Sumatera Barat. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola pemahaman para perwira di Korem 032 Wirabaja di Sumatera Barat tentang tuntutan profesionalisme militer dalam jajaran kesatuan mereka?
2. Bagaimana hambatan-hambatan profesionalisme militer di Korem 032 Wirabaja Sumatera Barat?
3. Apa langkah-langkah yang diambil oleh para perwira di Korem 032Wirabaja tersebut dalam menjawab tuntutan reformasi militer?
4. Profesionalisme Militer dilihat Karir Terbaik Putra Daerah Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pola pemahaman para perwira di Korem 032 Wirabrajadi Sumatera Barat tentang tuntutan profesionalisme militer dalam jajaran kesatuan mereka
2. Untuk memahami hambatan-hambatan profesionalisme militer di Korem 032 Wirabaja Sumatera Barat
3. Untuk memahami langkah-langkah yang diambil oleh para perwira di Korem 032Wirabaja tersebut dalam menjawab tuntutan reformasi militer
4. Untuk memahami Profesionalisme Militer dilihat Karir Terbaik Putra Daerah Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Studi profesionalisme militer ini adalah studi dari sudut pandang sosiologi militer. Kendatipun begitu penelitian ini tetap bersinggungan dengan ilmu sosial lain yaitu politik dan sejarah.

Khusus dalam sosiologi militer ini, penelitian ini memiliki peluang untuk menyempurnakan atau melengkapi teori yang pernah dikemukakan oleh teorisi di bidang kajian militer, khususnya mengenai pemikiran dan konsepsi tentang profesionalisme militer di luar Jawa.

2. Secara Praktis

a) Bagi peneliti

Untuk memenuhi syarat gelar Magister Pendidikan Program Studi Sosiologi-Antropologi di Universitas Negeri Padang dan memahami militer secara sosiologi lebih dalam.

b) Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat tentang informasi profesionalisme militer Indonesia di luar Jawa sehingga ketika bicara militer bukan hanya tentang Jawa.

c) Bagi pemerintah dan militer

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan militer di pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan tentang profesionalisme militer yang tidak hanya berpusat pada nilai-nilai budaya Jawa. Sehingga nilai-nilai

di luar Jawa ikut membentuk nilai-nilai profesionalisme militer
Indonesia.

BAB V

PEMBAHASAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

A. Pembahasan

Profesionalisme militer di Indonesia menjadi tuntutan rakyat yang diwakili aktor intelektual di Indonesia. Tuntutan ini terdengar jelas setelah reformasi dan akhirnya diatur dengan dikeluarkan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Perubahan paradigma TNI di nasional berhirarki langsung terhadap profesionalisme militer di seluruh tingkatan di Indonesia khususnya TNI Angkatan Darat, mulai dari tingkatan Babinsa (Bintara Pembina Desa) di tingkat desa, Koramil (Komando Rayon Militer) di tingkat Kecamatan, Kodim (komando distrik militer), Korem (komando resort militer) di tingkat provinsi, Kodam (komando daerah militer) membawahi beberapa resor militer, sampai markas besar angkatan darat. Dalam konteks Profesionalisme militer TNI Angkatan Darat di Sumatera Barat bisa dilihat di Korem 032 Wirabraja Sumatera Barat dalam kerangka teori Samuel Huntington dan teori interaksi simbolik.

Sejarah Korem 032 Wirabraja yang berawal dari Kodam III/17 Agustus adalah satuan militer yang dibangun untuk perang yaitu untuk menghadapi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Perbedaan dengan konsep militer profesional yang ditawarkan Samuel Huntington dengan konsep kekuatan militer adalah, satuan militer Indonesia dibangun kearah internal sekuriti sedangkan konsep profesionalisme militer Samuel Huntington kekuatan militer dibangun untuk eksternal sekuriti. Penyebab internal sekuriti adalah banyak pemberontakan-pemberontakan di wilayah Indonesia sehingga tugas utamanya

adalah membungkam pemberontakan-pemberontakan, dan sebagai pemain utama adalah Angkatan Darat yang akhirnya melahirkan konsep komando teritorial (internal security). Sedangkan konsep profesionalisme militer yang ditawarkan Samuel Huntington adalah eksternal sekuriti bertujuan untuk ekspansi kekuasaan keluar negara melalui kekuatan militer, dan militer hanya berfungsi sebagai pertahanan.

Dalam realitas objektif fungsi teritorial didoktrinkan kepada TNI fungsi TNI bukan saja diarea keamanan ke luar tetapi juga keamanan ke dalam. Sehingga dalam realitas subjektifpun fungsi teritorial TNI AD akan dibelah dengan berbagai argumentasi.

Berjalannya waktu Korem 032 Wirabraja yang berawal Kodam/III 17 Agustus yang didirikan tahun 22 Januari 1985 sampai 03 Mei 2012 kepemimpinan Korem 032 Wirabraja dipimpin oleh perwira yang berasal dari luar Sumatera Barat. Ketika kepemimpinan Korem 032 Wirabraja diberikan oleh Mabes TNI kepada putra daerah Sumatera Barat yaitu Kolonel Amrin dalam realitas subjektif perwira menengah TNI AD di Korem 032 Wirabraja dimaknai kepercayaan Mabes TNI AD kepada putra daerah memimpin daerah sendiri. Implikasinya adalah kepercayaan ini akan menguatkan militer atau melemahkan militer di Sumatera Barat. Putra daerah mempunyai berproses di Sumatera Barat ketika tugas-tugas TNI AD (Korem 032 Wirabraja) harus berhadapan dengan masyarakat Sumatera Barat akan ada bias karena berhadapan dengan kelompok etnis sendiri melahirkan keputusan yang tidak tegas dan disiplin. Implikasi lainnya ketika tugas-tugas TNI AD (Korem 032 Wirabraja) harus berhadapan

dengan masyarakat Sumatera Barat maka dengan adanya putra daerah permasalahan bisa diselesaikan dengan pendekatan personal maupun kultural.

1. Pemahaman Perwira Menengah tentang Profesionalisme Militer di KOREM 032 Wirabraja Sumatera Barat

a. Identitas Militer menurut Perwira Menengah

Identitas militer Indonesia adalah sebuah identitas yang mempunyai pengertian tersendiri walaupun berdasarkan pada kerangka dan acuan tertentu, perkembangan dan desakan situasi melahirkan militer mencari jalannya sendiri. Sebelum kemerdekaan tentara Indonesia dinamakan Tentara Pejuang yang berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, setelah negara berkembang di zaman Soekarno Tentara Nasional Indonesia, setelah Soekarno jatuh dari kepresidenan maka tentara berubah menjadi tentara sosial politik atau yang dikenal dengan Dwifungsi ABRI, setelah reformasi tentara berubah menjadi tentara profesional.

Pengertian militer bagi perwira militer dan militer TNI AD di Korem 032 Wirabraja Sumatera Barat adalah pengertian perwira militer secara teknis dan pengertian militer secara ideologis. Pengertian perwira militer secara teknis bisa dilihat dari fungsinya dan pengertian militer secara ideologis dilihat dari tujuannya. Pengertian militer secara teknis dari fungsi adalah menembak, membunuh, berlatih, dan lainnya, sedangkan dalam pengertian ideologis adalah benteng terakhir republik, pembela NKRI sebagai harga mutlak, dan satria yang gagah berani.

b. Profesionalisme Militer

Militer atau tentara profesional, sebuah istilah yang sering dikemukakan oleh Samuel P. Huntington adalah gambaran militer yang memiliki spesifikasi keahlian di bidang pertahanan, memiliki tanggung jawab sosial yaitu mengabdikan kepada negara atau dengan kata lain memperhatikan kepentingan nasional, dan memiliki karakter korporasi sehingga melahirkan *esprit de corps* yang kuat.⁶⁵ Huntington juga melihat ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam militer yang profesional. Adapun 3 aspek yang dikemukakan Huntington adalah militer harus mempunyai keahlian, tanggung jawab sosial, dan kelompok/lembaga.

Ketiga ciri militer profesional tersebut melahirkan apa yang Huntington sebut dengan *the military mind* yang menjadi dasar bagi hubungan militer dan Negara. Yang dimaksud dengan *the military mind* adalah suatu ideology yang berisi pengakuan militer profesional terhadap supremasi sipil. Negara yang kuat hanya mungkin jika ada kekuatan militer yang kuat, tapi kekuatan militer ini adalah abdi Negara.⁶⁶ Oleh karena itu Huntington menyatakan, semakin tinggi tingkat profesionalisme militer harus semakin jauh dari politik. Militer yang profesional harus selalu siap sedia melaksanakan putusan politik yang dilakukan oleh politisi sipil dan yang mempunyai legitimasi politik.

Dalam konteks realitas politik militer yang profesional diartikan oleh Panglima Laksamana Widodo AS pada tanggal 19-20 di Cilacap (2007:30) menyatakan secara tegas:

⁶⁵ Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics Civil-military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, 1957

⁶⁶ *Ibid*, Huntington, hal 79

“Bahwa TNI telah meninggalkan fungsi sosial dan politik serta dan melepaskan fungsi keamanan menjadi wewenang dan tanggung jawab Polri. Dengan demikian TNI kembali kepada jatidirinya sebagai tentara profesional yang berperan sebagai tentara profesional yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Profesionalisme TNI diukur dari tiga hal, yaitu kompetensi, akuntabilitas, dan kesejahteraan. kompetensi TNI adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman militer dan ancaman bersenjata, baik dari dalam maupun luar. Harus di garis bawahi bahwa TNI yang handal dan kredibel tidak bisa semata-mata dibangun hanya untuk menghadapi konflik internal. masalah-masalah internasional, wilayah perbatasan, pulau terdepan, dan masalah-masalah maritim mengharuskan TNI untuk mengembangkan kemampuan darat, laut, dan udara yang proposional yang mampu menghasilkan efek tangkal (*deterrence*).⁶⁷

Dinegara modern yang demokratis, peran tentara dibatasi pada pelaksanaan perintah di bidang pertahanan nasional, dalam keadaan darurat, dan keamanan dalam negeri. yang berhak mengeluarkan perintah kepada tentara adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan demokratis, yaitu yang dilakukan secara umum, bebas, dan rahasia. kekuasaan pemerintah pilihan rakyat di atas dikenal dengan supremasi sipil.⁶⁸

Dalam konteks perwira militer Korem 032 Wirabraja profesionalisme militer diartikan mengutamakan pada faktor teknis saja seperti ahli dibidangnya

⁶⁷Marsekal TNI Djoko Suyanto. 2007, *Menuju TNI Profesional Dan Dedikatif*, Jakarta, Pusat Penerangan TNI hal 5-6

⁶⁸Salim Said, 2006, *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan hal v

menembak, intelejen, sedangkan secara ideologis hanya mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Identitas Lembaga Militer

Lembaga militer adalah intitusi yang diberi kewenangan dalam menjalankan fungsi pertahanan oleh negara. Dalam masalah fungsi militer tidak ada perdebatan oleh perwira menengah di Korem 032 Wirabraja, yang menjadi perdebatan adalah lembaga sebagai institusi yang tidak pernah salah. Dalam pemahaman perwira menengah Korem 032 Wirabraja secara realitas objektif lembaga militer adalah lembaga yang tidak pernah salah baik dalam pengertian regulasi ataupun aspek teknisnya. Aspek regulasi ini seperti pelaksanaan dwifungsi ABRI dan aspek teknisnya banyaknya perwira TNI menyalahgunakan kewenangan seperti berbisnis.

Lembaga militer adalah lembaga yang fungsi atau perannya digariskan oleh undang-undang dan negara. Persoalannya adalah lembaga militer sampai sekarangpun, bukan hanya bermasalah secara kelembagaan tetapi regulasi yang mengatur militer tersebut secara internal militer dan eksternal kemiliteran. Lembaga militer pada zaman Orde Baru adalah lembaga yang *super power* memegang seluruh kewenangan dan lembaga *super body* yang tidak awasi dan tidak dikritik oleh lembaga maupun. Ketika lembaga negara telah menjadi *super power* dan *super body* maka secara nyata lembaga telah salah secara kelembagaan.

Dalam pemahaman perwira menengah Korem 032 Wirabraja lembaga militer tidak pernah salah, kalau ada kesalahan itu hanyalah oknum. Logika oknum ini

menjadi batu sandaran dari berbagai masalah yang terjadi ketika militer berinteraksi di internal militer atau berinteraksi dengan lembaga di luar militer. Logika oknum bisa dipakai untuk persoalan personal atau orang perorang seperti perceraian, perkelahian, narkoba, lari dari tugas tetapi bagaimana kesalahan ini dilakukan secara berkelompok dan terstruktur dalam arti melibatkan seluruh komponen lembaga militer mulai dari bawahan sampai atasan.

d. Identitas Perwira Militer

Perwira sebagai manajer kekerasan ini bukan utama dalam penelitian ini karena dalam pemahaman perwira militer TNI AD di Korem 032 Wirabraja perwira militer memiliki fungsi selain fungsi manajer kekerasan selain yaitu

pembinaan, pembinaan bersifat kedalam dan keluar. Kedalam pembinaan terhadap bawahan atau anak buah dan pembinaan keluar adalah pembinaan teritorial. Secara realitas objektif perwira menengah memposisikan diri sebagai seorang guru, kawan seperjuangan, komandan, hakim, penerjemah perintah dari komando tertinggi seperti dari Mabes TNI AD.

e. Tanggung Jawab Perwira Militer

Dalam menganalisa tanggung jawab perwira militer di Indonesia TNI AD ada tiga tanggung jawab militer yang pertama adalah tanggung jawab tugas militer untuk perang, kedua tugas militer selain perang, dan tugas teritorial. Tugas militer untuk perang seperti dikatakan Huntington pengaturan perlengkapan, pelatihan angkatan bersenjata, pengetahuan kegiatan perang, merencanakan perang dan siap untuk perang. Pada porsi ini yang dikatakan Huntington adalah benar. Tetapi tidak bisa menggambar secara keseluruhan fungsi dan tugas militer

Indonesia. Fungsi militer selain perang untuk memperbaiki citra militer karena bersifat bantuan dan kesukarelaan militer melakukan fungsi tersebut. Fungsi militer selain perang yang dilakukan oleh Korem 032 Wirabaja dirasakan manfaat oleh masyarakat seperti *Go Green* Singkarak yang menanam pohon-pohon untuk masyarakat di sekitar danau Singkarak dan bantuan terhadap korban tsunami yang terjadi Mentawai.

Sedangkan fungsi teritorial pada militer angkatan darat menjadikan tentara angkatan darat berada ditengah-tengah masyarakat. Kembalinya militer ke Barak adalah menjauhkan masyarakat secara interaksi dengan militer. Barak-barak militer berada di perbatasan-perbatasan wilayah, ketika kembali ke masyarakat militer harus meninggalkan semua atribut dan perlengkapan militer di barak dan mereka benar-benar seperti orang sipil. Dipertahankan fungsi teritorial oleh militer angkatan darat untuk membuat tetap menjadi bagian dari masyarakat atau dalam kata lain militer tetap ingin berjuang memiliki fungsi sosial dan politik karena mereka mendengarkan aspirasi masyarakat.

f. Penafsiran Perwira Menengah terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Terhadap TNI

Perwira menengah di Korem 032 Wirabaja mengalami dualisme pemikiran tentang militer ketika dihubungkan dengan undang-undang nomor 34 tentang TNI itu sendiri diawal mengatakan bahwa militer tidak pernah salah secara kelembagaan menjalankan fungsinya hanya mengikuti peraturan. Tetapi dengan dikeluarkan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI militer hanya dibidang pertahanan militer akan menuju militer menjadi profesional.

Pengetahuan pengertian ideologis dan teknis tentang militer profesional untuk TNI harus mendapatkan porsi yang besar sehingga pengetahuan ini bisa merubah mental militer baik secara lembaga dan personal.

2. Hambatan dalam Profesionalisme Militer di Korem 032 Wirabaja

Hambatan dalam profesionalisme militer di Indonesia dan Korem 032 Wirabaja adalah masalah gaji, perlengkapan dan peralatan militer. Kemenangan perang hari ini tidak lagi ditentukan oleh kualitas personil saja, tetapi jumlah dan kualitas perlengkapan dan peralatan ditambah kualitas personil. Tentara Indonesia khususnya angkatan darat di Korem 032 Wirabaja menyedihkan dalam segala hal personil, perlengkapan dan peralatan perang, walaupun fungsi Korem adalah fungsi kewilayaan atau teritorial. Secara realitas objektif perwira menengah Korem 032 Wirabaja mengatakan bahwa adalah keputusan yang harus diterima dan secara realitas subjektif harus ada perbaikan terhadap lembaga militer secara keseluruhan mulai dari gaji, perlengkapan, dan peralatan militer.

3. Perwira Menengah Korem 032 Wirabaja Menjawab Reformasi Militer

Perwira menengah menjawab reformasi pada di Korem 032 Wirabaja khususnya tidak berpolitik dan tidak berbisnis telah dijalankan secara maksimal, sehingga tidak ada ruang bagi tentara untuk melakukan berpolitik dan berbisnis secara resmi dalam kelembagaan. Untuk tidak berpolitik dan berbisnis reformasi di Korem 032 Wirabaja telah maksimal. Reformasi dibidang keuangan militer masih belum terlihat karena ini berapa anggaran yang diturunkan dan penggunaan

militer di Korem 032 Wirabaja tidak bisa minta keterangan dengan alasan rahasia negara.

4. Profesionalisme Militer dilihat Karir Terbaik Putra Daerah Sumatera Barat.

Topik ini penulis munculkan karena profesionalisme militer berada pada wilayah yang bisa diukur dengan ukuran-ukuran peraturan yang berlaku. Secara realita putra-putra terbaik yang berasal dari Sumatera Barat belum pernah mencapai pangkat tertinggi di Angkatan Darat yaitu bintang empat atau Jendral. Dari penelitian ada tiga indikator yang tidak mendukung pertama kualitas, kedua rekomendasi, ketiga masalah PRRI.

Tidak adanya putra Sumatera Barat di TNI khususnya TNI AD tidak mencapai karir tertinggi sampai ke bintang empat selain pemahaman yang disampaikan oleh perwira menengah ada hal lain yang mempengaruhinya. Jabatan atau pangkat jenderal bintang empat terbatas hanya satu dalam kesatuan TNI AD atau dalam periode kekuasaan, satu orang yaitu kepala staf angkatan darat (Kasad), pimpinan tertinggi angkatan darat.

Dalam realitas subyektif jenderal bintang empat oleh perwira tinggi adalah jabatan politik dibandingkan jabatan karir. Sehingga perhitungan politik yang lebih menentukan seperti suka dan tidak suka, ini orang siapa, adakah mempunyai masa lalu dengan penguasa, loyalitas kepada siapa dan pertanyaan politik praktis lainnya.

Selain faktor-faktor diatas yang mempengaruhi jabatan bintang empat ini tidak tercapai oleh putra Sumatera Barat ada faktor yang ikut menentukan yaitu

faktor secara sosiologis. Faktor sosiologis tersebut adalah bagaimana masyarakat Minangkabau berinteraksi dalam sistem kemasyarakatan Minangkabau secara keseluruhan yang akhirnya menjadi karakter masyarakat Minangkabau.

Karakter masyarakat Minangkabau atau Sumatera Barat yang akhirnya menjadi karakter individu. Karakter masyarakat Minangkabau tersebut adalah karakter egaliter seperti yang disampaikan oleh Navis (1983:50) masyarakat Minang Kabau menganut ajaran egaliter dan demokrasi terlihat pengambilan keputusan yang dialektis, yaitu senantiasa membangkitkan konflik. Seorang pemimpin seperti mamak dan penghulu sesungguhnya merupakan simbol, sedangkan segala keputusan ditentukan oleh mufakat. Sejalan dengan pendapat di atas masyarakat egaliter (*egalitarian*) adalah sikap atau perilaku yang memperlihatkan atau memegang suatu keyakinan terhadap keuntungan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang⁶⁹. Istilah masyarakat egaliter (*egalitarian societies*) telah lebih 60 tahun diperkenalkan oleh antropolog Meyer Fortes dan Evans-Pritchard, saat mereka, menulis buku tentang Sistem Politik Masyarakat Afrika (1940). Menurut mereka, masyarakat egaliter adalah dimana didalamnya tidak terdapat pembagian strata, status dan kekayaan secara tajam.

Karakter masyarakat egaliter Minangkabau tidak cocok dengan sistem militer yang menganut sistem tidak ada perdebatan dalam pengambilan keputusan, pemimpinlah yang menjadi penentu keputusan (perintah datang jalankan). Karakter masyarakat yang dibutuhkan dalam masyarakat militer adalah masyarakat paternalistik yang terstrata dengan jelas, senior dan junior, pimpinan

⁶⁹ Nussyirwan Effendi, 2004, *Posisi Nagari Minang Kabau Potensi, Pewarisan dan Pengembangan Dalam Paradigma Multi Kultural*. (Padang:Universitas Andalas) hal 2

sebagai penentu keputusan, seperti masyarakat Jawa seperti yang disampaikan oleh Handayani dalam Astuti (2011:45) :

Kebudayaan Jawa dikenal sangat paternalistik, mendukung superioritas generasi yang lebih tua, kelas aristokrat di atas orang biasa dan lelaki di atas perempuan. Dan dalam cara memimpin Kepemimpinan paternalistik adalah pemimpin dianggap sebagai bapak dan anak buahnya dianggap sebagai anak atau manusia yang belum dewasa dan perlu bimbingan.

Budaya kerja paternalistik lebih dekat dengan budaya kerja militer karena bawahan mengerjakan perintah ketika ada perintah dari atasan seperti yang dikatakan Frinaldi (2011:4) sebagai bawahan mempunyai kecenderungan menunggu arahan dari pimpinan untuk melaksanakan sesuatu hal dalam bekerja.

Karakter egaliter lebih kearah masyarakat dialogis atau komunikasi dua arah dalam berinteraksi, sedangkan masyarakat otoriter dan kepatuhan berlebihan terhadap pemimpin adalah masyarakat yang berkomunikasi satu arah. Pola komunikasi satu arah ini yang cocok dengan karakter militer karena pemimpin memberikan perintah rakyat atau bawahan melaksanakannya. Sedangkan masyarakat egaliter mempertanyakan perintah dan kesepakatanlah yang akhirnya menjadi acuan pelaksanaan perintah.

B. Implikasi Penelitian

Pemilihan kerangka teori dalam sosiologi sebagai pisau analisa untuk menjelaskan fakta-fakta menjadi makna yang dipahami sosiologis. Dimana pisau analisa tersebut bisa mendeteksi permasalahan yang ada. Sehingga kerangka teori yang digunakan harus memiliki kecocokan dengan fenomena dan karakteristik masalah penelitian yang akan dijelaskan, sehingga terungkap realitas masalah yang sesungguhnya.

Kerangka teori dalam penelitian mempunyai dua alur pemikiran, pemikiran pertama adalah penelitian mendukung atau membangun teori yang ada, pemikiran kedua adalah merevisi, meruntuhkan teori lama dan diganti dengan teori baru, seperti adigum bahwa teori baru dibangun diatas kuburan teori lama. Demikianlah pula penelitian ini memiliki implikasi teoritik.

1. Relasi Teori Huntington

Kerangka teori yang dibangun oleh Samuel Huntington teorinya dengan posisi tentara dalam negara demokrasi. Perspektif teori ini adalah kondisi tentara setelah Orde Baru dan dikeluarkan undang-undang nomor 34 tentang TNI. Karena sebelumnya peran tentara yang mengisi seluruh peran dalam negara sehingga banyak terjadi penyalagunaan kewenangan. Peranan tentara yang memonopoli alat dan tindakan kekerasan atas nama negara.

Setelah Orde Baru dan dikeluarkan undang-undang nomor 34 tentang TNI, kewenangan TNI dibatasi pada peran tentara bidang pertahanan. Bertolak dari analisis relasi pandangan profesionalisme lama (*old profesionalis*) Samuel Huntington asumsi-asumsi tersebut adalah:

Pertama pedefinisian jenis pekerjaan atau keahlian militer. Huntington berpegang pada tesis bahwa keahlian militer adalah manajemen kekerasan sedangkan sebagai profesional perwira militer sebagai manajer kekerasan. Pandangan tersebut sesuai dengan pengertian yang dikemukakan Harold D Lasswell yang mendefinisikan pekerjaan militer sebagai speasilis dibidang kekerasan.

Dalam kerangka berfikir dimulai dengan mengubah total kepribadian manusia sipil manusia militer yaitu manusia yang mati rasa sebagai manusia dan berubah menjadi mesin pembunuh. Karena itu maka tentara itu harus terpisah dengan masyarakat sipil karena mempunyai dua pola hidup yang berbeda. Kejadian-kejadian tentara melakukan kekerasan terhadap masyarakat, hal ini terjadi bukan karena kesalahan tentara atau kesalahan masyarakat tetapi cara pandang yang berbeda. Masyarakat sipil terlatih dengan cara-cara sipil berbicara, berkompromi dan bernegosiasi kekerasan adalah pilihan terakhir sedangkan tentara terlatih dengan cara tentara berperang, membunuh (menembak, melumpuhkan dengan beladiri), melaksanakan perintah, dan tidak ada kompromi.

Kedua pandangan mengenai larangan terlibat dalam politik dipengaruhi oleh pandangan teoritis administrasi klasik yang dalam pandangan mereka. Pemisahan secara keras dan tegas antara fungsi politik (pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan) dengan fungsi administrasi (implementasi kebijakan dan realisasi keputusan) dengan fungsi administrasi (implementasi kebijakan dan realisasi keputusan) adalah mutlak, sebagaimana digagas oleh ilmuwan administrasi klasik Dwight Waldo maupun Frank J. Goodnow⁷⁰.

Larangan militer berpolitik secara konsep Huntington menjauhkan militer dari profesionalisme dan secara realitas keterlibatan TNI di Indonesia dalam politik membuka celah keterlibatan militer di bidang lainnya seperti bisnis. Keterlibatan militer berpolitik pada akhir menjauhkan militer dari profesionalisme.

⁷⁰ Dwight Waldo, *what is Public Administration* dan Frank J Goodnow "*Politics and Administration*" dalam Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde *Classics of Public Administration*, brook cole Publishing Company, 1987

2. Nilai-Nilai Yang Diambil Dari Penelitian

Penelitian tentang militer di Korem 032 Wirabraja bukan hanya mencari fakta dan lalu menganalisa. Tetapi juga mencari nilai-nilai yang bisa menjadi pedoman bagi kehidupan pribadi dan organisasi penulis. Nilai pertama adalah nilai disiplin, disiplin dalam komunitas militer bukan hanya tepat waktu tetapi tetapi cara hidup seperti yang terdapat dalam undang-undang republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa disiplin adalah serangkaian peraturan dan norma yang mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna, dalam kehidupan sipil masalah disiplin masih diartikan datang tepat waktu dan mematuhi peraturan yang ada tetapi dalam kehidupan militer disiplin diartikan cara hidup. Ketika penulis mengakhiri penelitian, penulis mengalami perubahan secara pribadi yaitu lebih tepat waktu dan menghargai kewenangan struktural yang prosedural walaupun belum menjadi cara hidup secara keseluruhan.

Nilai kedua yang didapatkan dalam penelitian adalah menjaga kebersihan dengan tidak menumpuk sampah. Ketika ada sampah disapu, diambil dikumpulkan dan langsung dibuang ketempat pembakaran sampah. sehingga setiap hari lingkungan militer kita akan melihat kebersihan dan kerapian mulai halaman depan sampai halaman belakang, di luar dan di dalam ruangan Korem 032 Wirabraja, sehingga kebersihan dan kerapian menginspirasi penulis untuk berbuat yang sama.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan berdasarkan telaah dari berbagai sumber yang telah dituangkan dalam pembahasan sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Samuel Huntington profesionalisme militer atau profesionalisme lama (*Old Professionalism*) adalah fungsi militer hanya untuk perang dan keahlian perwira adalah manajemen kekerasan, sedangkan pemahaman perwira menengah di Korem 032 Wirabraja bukan hanya dalam manajemen mengelola kekerasan semata atau manajemen kekerasan (operasi militer untuk perang) tetapi juga terdapat manajemen militer selain perang (operasi militer selain perang). Implikasi dari pemahaman tersebut, maka tugas-tugas operasi militer selain perang (teritorial dan penanggulangan bencana) memiliki derajat yang hampir sama dengan operasi militer untuk perang. Sehingga pemahaman profesionalisme militer yang ditawarkan oleh Samuel Huntington tidaklah sama dengan pemahaman profesionalisme militer perwira menengah di Korem 032 Wirabraja.
2. Secara teknis gaji, perlengkapan, peralatan militer masih menjadi hambatan bagi militer untuk mencapai profesionalisme militer yang ideal bagi militer indonesia khususnya angkatan darat di Korem 032 Wirabraja.
3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Korem 032 untuk menjawab reformasi militer seperti membuat intruksi, pelatihan, dan memberi sanksi

sudah tepat sehingga tercipta prajurit yang profesional baik secara teknis maupun ideologis.

4. Tidak adanya pangkat putra Sumatera Barat pada tingkatan tertinggi yaitu jenderal bintang empat di TNI AD dipengaruhi oleh banyak sebab mulai kompetensi pribadi, rekomendasi sosial kemasyarakatan, dan peristiwa PRRI. Disamping itu masalah lainnya adalah terbatas pangkat tersebut karena di TNI AD hanya satu pangkat tersebut yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, karena hanya satu pangkat tersebut maka penentuannya lebih bersifat politis.

2. Saran

1. Dengan ditetapkannya undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya angkatan darat, maka diperlukan sosialisasi dan pendoktrinan yang masif untuk pemahaman yang sama di TNI AD tiap tingkatan untuk membentuk TNI AD yang profesional.
2. Peningkatan anggaran TNI sehingga permasalahan teknis seperti gaji, perlengkapan dan peralatan militer tidak menjadi halangan untuk membentuk TNI profesional, sehingga semboyan TNI kuat negara kuat dan rakyat sejahtera bukanlah semboyan semata.
3. Langkah-langkah menjawab reformasi militer yang diambil oleh TNI AD khususnya Korem 032 Wirabaja telah tepat seperti sosialisasi (intruksi), pelatihan, dan perlangkuan sanksi. Langkah-langkah selanjutnya adalah keterbukaan dibidang keuangan.

4. Untuk bisa mencapai pangkat tertinggi jenderal bintang 4 oleh putra Sumatera Barat maka diperlukan langkah-langkah yaitu proses perekrutan taruna Akabri di Sumatera Barat yang diikuti oleh umumnya putra Sumatera Barat diseleksi dengan ketat sehingga menghasilkan taruna yang mempunyai kualitas pribadi yang tinggi, dan masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan maupun individu merekomendasikan secara sosial dan politik untuk putra terbaik Sumatera Barat menjadi pimpinan TNI.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Navis, 1983, *Dialektika Minang Kabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*, Padang, Genta Singgalang Press.
- ABRI Mabes TNI AD, 1989, *Petunjuk Lapangan Tentang Komando Resort Militer*, Jakarta, Mabes TNI AD
- Alamsyah. 1969, *Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Jakarta: Sekretaris Negara RI
- Adam Malik dan dkk, 1978, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jakarta, MPR
- Amos Perlmutter, 1985, *Militer dan Politik*, Jakarta, Rajawali Pers
- Anonim. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Pertahanan Negara dan Kepolisian Negara*. Jakarta BP. Panca Usaha
- Asren Nasution, 2003, *Religiositas TNI Refleksi Pemikiran Jenderal Besar Soedirman*. Jakarta. Prenada Media
- Audrey Kahin dan George Mc. Turnan Kahin, 2000, *Subversi Politik Luar Negeri*, Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Bambang Kesowo. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Pertahanan Negara dan Kepolisian Negara*. Jakarta, BP. Panca Usaha
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara
- Connie Rahakundini Bakrie, 2007, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Dewi Fortuna Anwar. 2004. *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Jakarta. LIPI
- Dwight Waldo, *what is Publik Administration* dan Frank J Goodnow 1987, "Politics and Administration?" dalam Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde Classics of Publik Administration, brook cole Publishing Company
- E. Kristi Poerwandari, 2005 *Pendekatan Kualitatif Penelitian Perilaku Manusia*, Perfecta LPSP3 Fakultas Psikologi UI, Jakarta, 2005